PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
f. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
g. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibawah Kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 2

(1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Camat mempunyai fungsi :

a. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu ;
b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat ;
d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat ;
e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat di wilayah Kecamatan ;
g. Koordinator Operasional Cabang Dinas dan UPTD di wilayah kerja Kecamatan ;
h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 5

(1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan ;

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 7

Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;

c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Kelurahan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Camat
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat
c. Unsur Pelaksana, Seksi-seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan ;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
3. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Seksi Pelayanan Umum.
d. Kelompok jabatan Fungsional

(2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Lurah ;
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat.
c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan ;
2. Seksi Pembangunan ;

3. Seksi Keamanan dan Ketertiban ;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah ;

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan sebagian tugas Camat dan Lurah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat atau Lurah ;

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan ;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja Kecamatan dan Kelurahan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;

(3) Setiap pimpinan unit kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usul Camat melalui Sekretaris Daerah ;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 26 APRIL 2001 NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI C.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001

DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DEFINITIF

A. KECAMATAN
1. Kecamatan Sidoarjo
2. Kecamatan Buduran
3. Kecamatan Candi
4. Kecamatan Gedangan
5. Kecamatan Sedati
6. Kecamatan Waru
7. Kecamatan Taman
8. Kecamatan Krian
9. Kecamatan Wonoayu
10. Kecamatan Sukodono
11. Kecamatan Balongbendo
12. Kecamatan Tarik
13. Kecamatan Tulangan
14. Kecamatan Prambon
15. Kecamatan Krembung
16. Kecamatan Tanggulangin
17. Kecamatan Jabon
18. Kecamatan Porong

B. KELURAHAN
1. Wilayah Kecamatan Sidoarjo, terdiri dari :
   a. Kelurahan Magersari
   b. Kelurahan Pucang
   c. Kelurahan Sidoklumpuk
   d. Kelurahan Sidokumpul
   e. Kelurahan Pucanganom
   f. Kelurahan Bulusidokare
   g. Kelurahan Sekardangan
   h. Kelurahan Celep
   i. Kelurahan Sidokare
   j. Kelurahan Pekauman
   k. Kelurahan Lemahputro

2. Wilayah Kecamatan Porong, terdiri dari :
   a. Kelurahan Porong
   b. Kelurahan Mindi
   c. Kelurahan Juwetkenongo
   d. Kelurahan Gedang
   e. Kelurahan Jatirejo
   f. Kelurahan Siring

3. Wilayah Kecamatan Krian, terdiri dari :
   a. Kelurahan Krian
   b. Kelurahan Tambakkemerakan
   c. Kelurahan Kemasan

4. Wilayah Kecamatan Taman, terdiri dari :
   a. Kelurahan Taman
   b. Kelurahan Ketegan
   c. Kelurahan Sepanjang
   d. Kelurahan Wonocolo
   e. Kelurahan Bebekan
   f. Kelurahan Ngelom
   g. Kelurahan Kalijaten
   h. Kelurahan Geluran

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk dan menata kembali Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

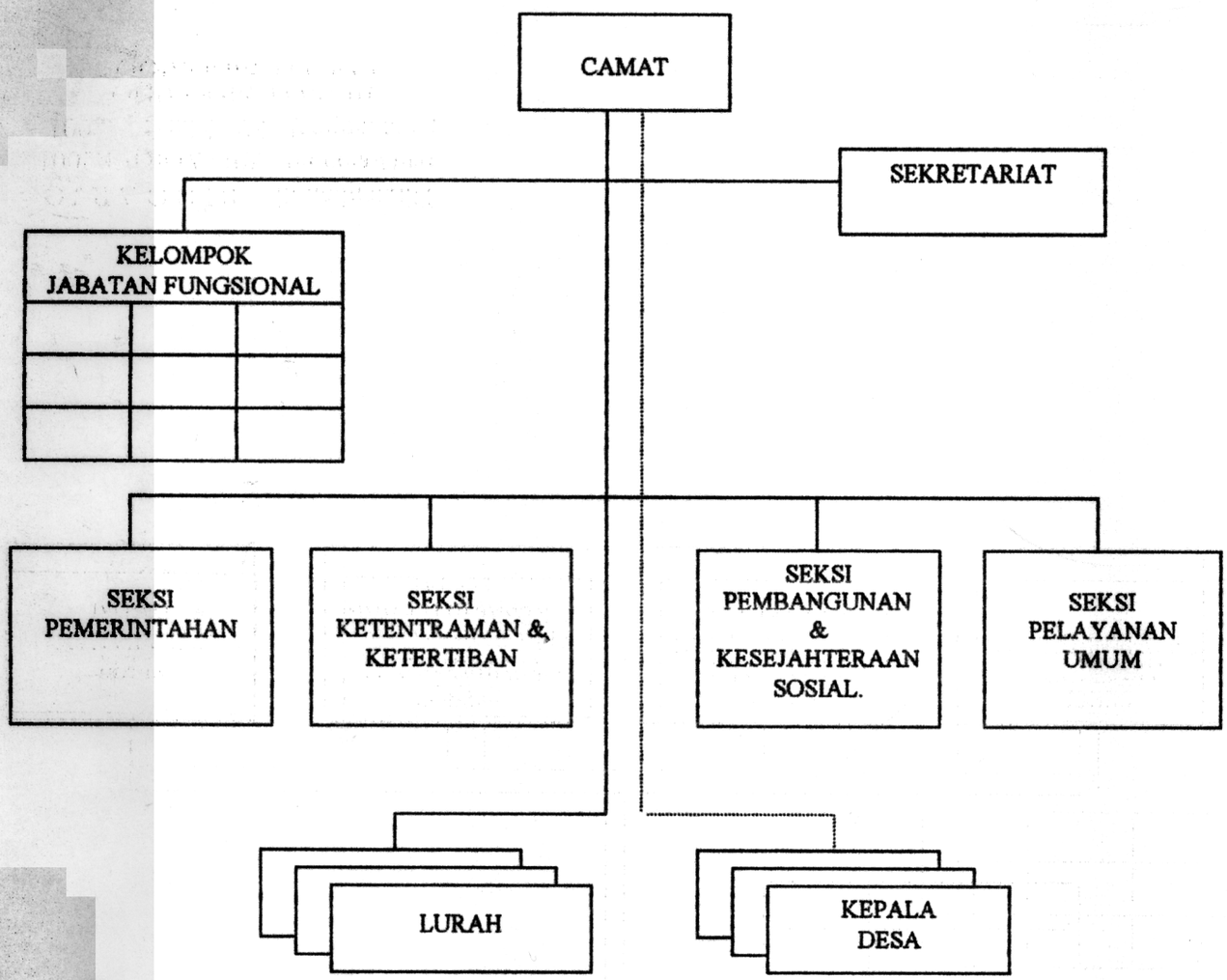
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18 cukup jelas

----------000----------

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



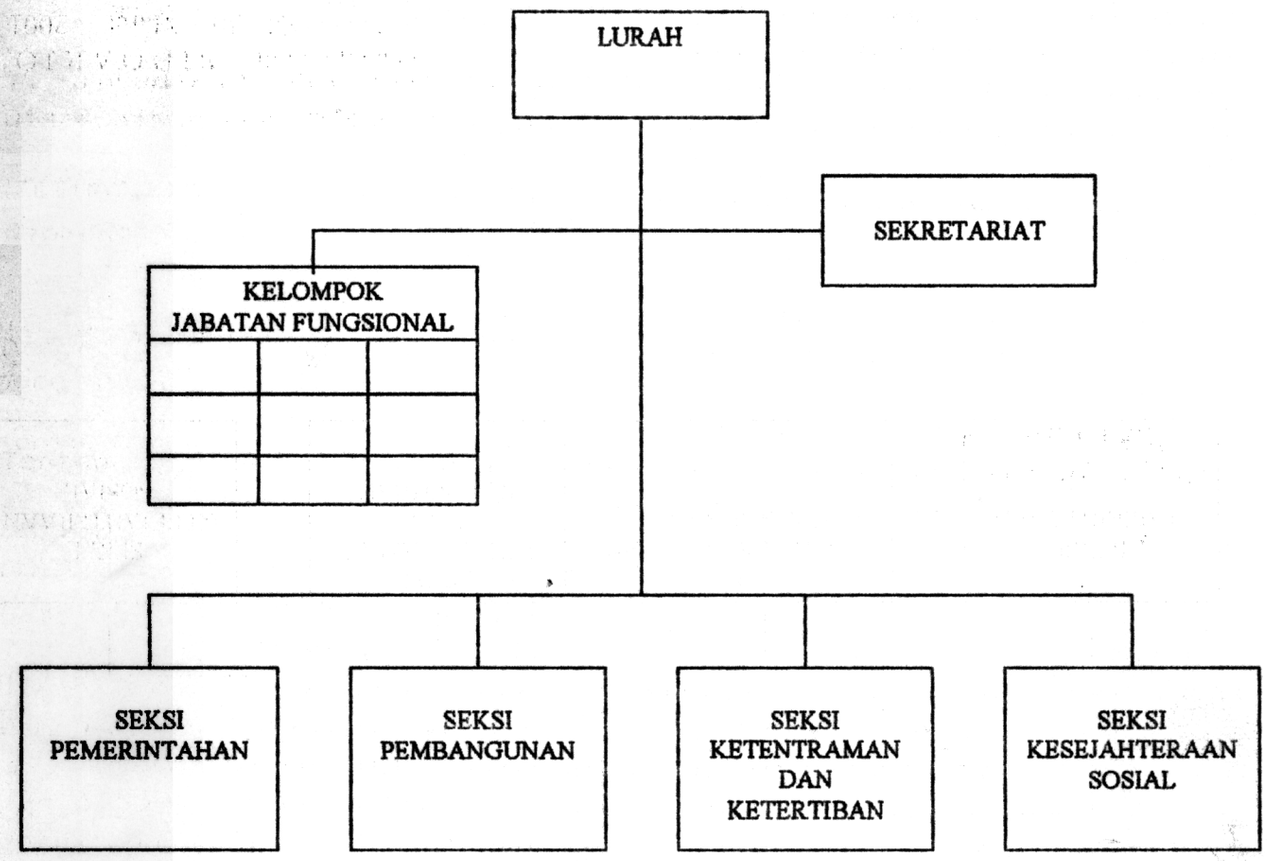
Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO